

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi Hubungan Internasional, ketahanan pangan dipandang sebagai bagian dari isu keamanan global yang bersifat non-tradisional. *Food and Agriculture Organization* dan *World Food Programme* (2025) menekankan bahwa krisis pangan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial dan politik suatu negara. Situasi ini semakin rumit karena krisis pangan berkaitan dengan perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketimpangan akses pangan antarnegara, sehingga menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda penting dalam tata kelola global. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran besar sebagai pengelola pangan di rumah tangga dan sebagai pelaku dalam sistem pangan lokal, sehingga kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan global.

Isu ketahanan pangan kini menjadi perhatian utama dunia melalui agenda *Sustainable Development Goals* SDGs 2: *Zero Hunger*. Pembahasan tentang ketahanan pangan semakin penting karena terkait dengan masalah global yang kompleks dan mendesak. Pangan tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas geopolitik serta ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. SDGs 2: *Zero Hunger* menargetkan tercapainya ketahanan pangan dan akses pangan bergizi bagi semua orang. Namun, pencapaian tujuan ini masih terhambat oleh perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan konflik global

yang mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan. Selain itu, meningkatnya *food waste* ikut menghambat upaya mencapai *Zero Hunger*, sehingga pengurangan sampah makanan menjadi bagian penting dari komitmen global tersebut.

Kondisi tersebut juga dialami Indonesia. Bappenas (2022) mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 115–184 juta ton *food loss and waste* per tahun, atau sekitar 300 kg per kapita, menjadikannya salah satu penghasil *food waste* terbesar di dunia. Kerugian ekonominya diperkirakan mencapai Rp 213–551 triliun per tahun (4–5% PDB). Data Antara (2021) juga menunjukkan bahwa volume *food waste* terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menjadi masalah serius karena berdampak pada lingkungan, melemahkan ketahanan pangan nasional, dan menambah beban rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Masalah ketahanan pangan di Indonesia juga terlihat pada hasil *Food Security Vulnerability Atlas* (FSVA) 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi atau distribusi, tetapi juga dengan pemanfaatan pangan yang masih kurang efisien di tingkat rumah tangga. FSVA 2021 mencatat bahwa 74 dari 514 kabupaten/kota masih berisiko tinggi mengalami kerawanan pangan akibat keterbatasan akses, tingginya kemiskinan, dan ketergantungan pada pasokan luar daerah (Ariani et al., 2023). Pada tingkat lokal, dan ditahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Bintan masih tergolong rentan. Meskipun bersifat lokal, kondisi Bintan mencerminkan tantangan khas wilayah kepulauan yang juga dialami banyak daerah pesisir lainnya di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa kerentanan pangan tetap menjadi isu penting, baik secara nasional maupun daerah, terutama di wilayah

dengan keterbatasan geografis(Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bintan, 2023).

Food waste memiliki hubungan langsung dengan ketahanan pangan keluarga. Hidayat et al. (2020) menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat seperti berbelanja berlebihan, kurang mampu mengelola stok makanan, dan kebiasaan menyisakan makanan menjadi penyebab utama meningkatnya sampah makanan rumah tangga. Nizmi et al. (2024) juga menemukan bahwa *food waste* berdampak pada naiknya angka kemiskinan, stunting, dan ketidakamanan pangan keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa pengurangan food waste bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam kondisi seperti ini, peran perempuan menjadi semakin penting. UN Women (2012) mencatat bahwa perempuan berkontribusi hampir 45% terhadap produksi pangan di negara-negara berkembang. Namun, mereka masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti minimnya akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pelatihan. Ketidaksetaraan ini membuat perempuan lebih rentan ketika terjadi krisis pangan, tetapi sekaligus menempatkan mereka sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan konsumsi, pengelolaan, dan pemanfaatan pangan di tingkat rumah tangga. Situasi serupa juga terlihat di banyak negara kepulauan atau *Small Island Developing States* (SIDS), menunjukkan bahwa kontribusi perempuan merupakan elemen penting dalam pembahasan tentang ketahanan pangan dan posisi Perempuan Global.

Di banyak negara, peran perempuan dalam sistem pangan global telah menjadi perhatian penting bagi lembaga internasional seperti FAO, IFPRI, dan UN Women. FAO (2011b) menegaskan bahwa apabila perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya produksi, pelatihan, dan teknologi, produksi pangan global berpotensi meningkat sebesar 20–30%. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan tidak hanya signifikan pada tingkat domestik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan dunia. Pola global tersebut tercermin pula pada konteks lokal, termasuk di wilayah kepulauan seperti Bintan, di mana perempuan memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan keluarga di tengah keterbatasan geografis dan kerentanan struktural. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kontribusi perempuan tidak hanya penting bagi wilayah lokal, tetapi juga mencerminkan dinamika global yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam menciptakan ketahanan pangan.

Fenomena *food waste* menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap ketidakmampuan sistem pangan untuk mencapai kondisi yang berkelanjutan. FAO mencatat bahwa sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun, atau hampir sepertiga dari total pangan yang diproduksi di dunia (Ariani et al., 2022). Jumlah ini tidak hanya menunjukkan ketidakefisienan sistem produksi dan konsumsi, tetapi juga menggambarkan adanya ketimpangan antara ketersediaan pangan global dan pola konsumsi masyarakat yang cenderung berlebih. Di Indonesia, UNEP *Food Waste Index* tahun 2021 memperkirakan bahwa masyarakat Indonesia menghasilkan sekitar 20,9 juta ton sampah makanan per tahun, dan sebagian besar dihasilkan dari aktivitas rumah tangga (GoodStats, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan *food*

waste terjadi mulai dari tahap pembelian bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, hingga konsumsi sehari-hari, sehingga menjadikan rumah tangga sebagai titik kritis dalam pembentukan perilaku pangan yang berkelanjutan.

Isu ketahanan pangan global turut memengaruhi kondisi nasional hingga daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti Bintan. Kerumitan rantai pasok internasional, fluktuasi harga dunia, dan ketergantungan impor membuat stabilitas pangan rumah tangga semakin rentan, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan dan akses distribusi laut. Kondisi ini menyebabkan pilar *access* dan *availability* dalam kerangka *Food and Nutrition Security* sering tidak stabil. Dalam situasi tersebut, peran perempuan dalam mengelola konsumsi dan mengurangi pemborosan pangan menjadi semakin penting.

Ketahanan pangan dalam konteks tersebut juga menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan (*interdependensi*) dalam sistem pangan global. Kebutuhan pangan suatu wilayah tidak sepenuhnya dapat dipenuhi secara mandiri, melainkan bergantung pada distribusi, perdagangan, serta stabilitas pasokan dari wilayah lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa gangguan pada satu bagian sistem pangan global dapat berdampak pada wilayah lain, termasuk daerah kepulauan seperti Bintan. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika global yang saling terhubung dalam kajian Hubungan Internasional.

Keterkaitan antara dinamika global, nasional, dan lokal menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari konteks global yang lebih luas.

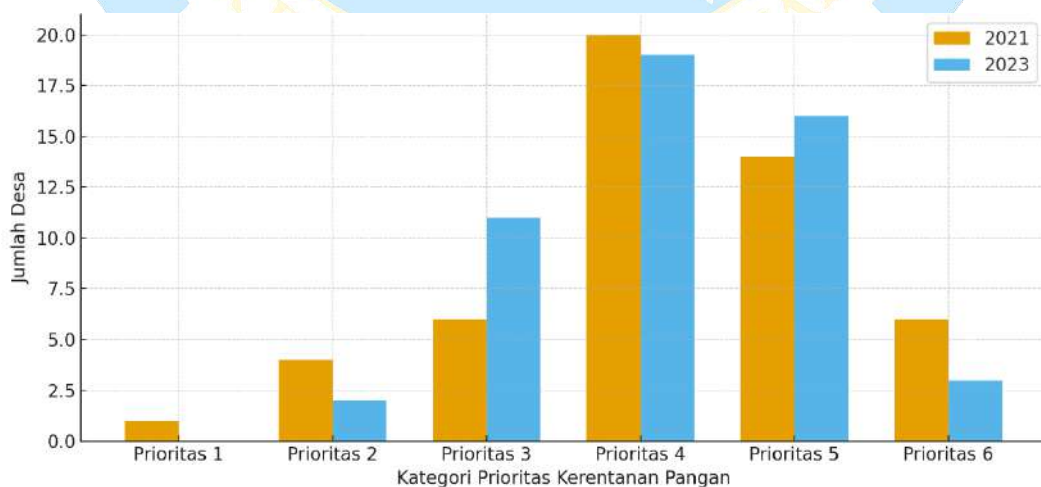
Gangguan pada rantai pasok internasional, perubahan iklim berskala global, serta fluktuasi harga pangan dunia memiliki dampak langsung terhadap kemampuan wilayah kepulauan dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dalam kerangka tersebut, Pulau Bintan menjadi contoh nyata bagaimana dinamika global dapat menimbulkan kerentanan di tingkat lokal, terutama bagi perempuan yang bertanggung jawab mengelola konsumsi rumah tangga. Dengan memposisikan Bintan sebagai bagian dari sistem pangan global, penelitian ini menempatkan pengalaman perempuan setempat sebagai cerminan tantangan yang juga dihadapi oleh perempuan di wilayah rentan lainnya di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks tersebut, perempuan memegang peranan sentral karena berada paling dekat dengan pengelolaan pangan rumah tangga mulai dari menentukan bahan pangan yang dibeli, mengatur porsi, mengolah makanan, hingga memastikan pemanfaatannya agar tidak terbuang. Dinamika domestik inilah yang menjadikan *food waste* tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan. Tingginya *food waste* berpotensi memperburuk kerentanan pangan, terutama di wilayah kepulauan seperti Bintan yang memiliki keterbatasan lahan dan ketergantungan pada pasokan luar daerah. Pada rumah tangga Indonesia, perempuan memang menjadi pengatur utama konsumsi dan manajemen pangan. Rumbekwan & Tanamal (2023) menegaskan bahwa peran ini tidak hanya menjaga keberlangsungan konsumsi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan, teknologi, dan pengakuan formal dalam kebijakan. Barki & Burhan (2025) juga bahkan

menunjukkan bahwa perubahan iklim memperparah ketimpangan gender dalam akses pangan, sehingga membuat perempuan semakin rentan terhadap krisis pangan.

Keterkaitan antara *food waste*, kontribusi perempuan, dan ketahanan pangan semakin relevan ketika dikaitkan dengan konteks wilayah kepulauan seperti Pulau Bintan. Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, Bintan memiliki karakteristik geografis yang penuh tantangan seperti keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan terhadap suplai pangan dari luar daerah, fluktuasi harga, dan kondisi distribusi yang dipengaruhi cuaca laut. FSVA (2021) menunjukkan bahwa terdapat satu desa sangat rentan, empat desa rentan, dan enam desa cukup rentan di Bintan. Pada tahun 2023, kondisi menunjukkan perbaikan, tetapi beberapa wilayah pesisir dan pulau kecil masih tergolong rentan karena minimnya infrastruktur jalan, akses air bersih, dan fasilitas logistik. Ketergantungan terhadap suplai eksternal membuat rumah tangga di Bintan harus mampu mengelola konsumsi secara lebih adaptif, di mana perempuan kembali menjadi aktor kunci dalam menjaga stabilitas konsumsi keluarga.

Gambar 1.1 Diagram Perbandingan Tingkat Kerentanan Pangan di Bintan Tahun 2021 dan 2023



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan pemetaan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), kondisi kerentanan pangan di Kabupaten Bintan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup nyata. Pada tahun 2021, dari 51 desa/kelurahan masih terdapat satu desa yang tergolong sangat rentan, empat desa masuk kategori rentan, dan enam desa termasuk kategori cukup rentan. Dengan demikian, terdapat sebelas desa yang memiliki risiko tinggi terkait permasalahan pangan. Desa dengan tingkat kerentanan tertinggi saat itu adalah Pulau Pinang di Kecamatan Tambelan, yang dipengaruhi keterbatasan akses jalan, air bersih, serta layanan Kesehatan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bintan, 2021). Sementara itu, hasil pemetaan tahun 2023 mengindikasikan adanya perbaikan, ditandai dengan tidak adanya lagi desa yang masuk kategori sangat rentan. Kendati demikian, masih ditemukan dua desa yang berada pada kategori rentan dan sebelas desa dalam kategori cukup rentan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap pangan maupun fasilitas dasar, meskipun desa-desa pesisir dan pulau kecil masih menghadapi berbagai hambatan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bintan, 2023). Hingga tahun 2025, tantangan terkait ketahanan pangan di Bintan masih berpotensi muncul, yang dipicu oleh keterbatasan lahan pertanian, ketergantungan pasokan eksternal, dan fluktuasi harga pangan. Karena itu, penting untuk merumuskan strategi lokal yang lebih solid serta memperkuat pemberdayaan perempuan guna menjaga ketahanan pangan daerah.

Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan berperan besar dalam mengatur konsumsi pangan, mulai dari merencanakan belanja, mengolah, menyimpan, hingga menyajikan makanan. Penelitian Hidayat et al. (2020) dan Nizmi et al. (2024)

menunjukkan bahwa pola konsumsi, termasuk *food waste*, memiliki kaitan langsung dengan kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan keluarga. Di wilayah kepulauan seperti Bintan, peran perempuan menjadi semakin penting karena keterbatasan pasokan membuat pemanfaatan pangan secara efisien menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan rumah tangga.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Food and Nutrition Security* (FNS) yang berfokus pada empat pilar: ketersediaan, akses, pemanfaatan dan gizi, serta stabilitas. Kerangka ini membantu menganalisis secara lebih menyeluruh bagaimana perempuan sebagai pengelola konsumsi rumah tangga menjaga ketahanan pangan melalui pemanfaatan pangan yang tepat, pengurangan *food waste*, dan pengelolaan sumber daya secara efisien.

Selama ini, penelitian tentang *food waste* lebih banyak berfokus pada rantai pasok, perilaku konsumen secara umum, atau dampaknya terhadap lingkungan. Kajian yang menautkan *food waste* dengan kerentanan pangan rumah tangga di wilayah kepulauan masih sangat sedikit. Penelitian yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan pangan dan pengurangan *food waste* juga terbatas, padahal perempuan adalah pihak yang paling dekat dengan manajemen pangan keluarga. Karena itu, terdapat celah penelitian yang penting untuk diisi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan kerentanan pangan rumah tangga di Pulau Bintan dan mengkaji bagaimana perempuan berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan konsumsi dan pengurangan *food waste*. Temuan yang dihasilkan diharapkan

memberikan gambaran empiris yang relevan secara global, karena pengalaman perempuan Pulau Bintan mencerminkan situasi yang juga dialami perempuan di berbagai wilayah rentan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan daerah, strategi pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian SDGs 2: *Zero Hunger*.

1.2 Rumusan Masalah

Maka sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah “Bagaimana kondisi ketahanan dan kerentanan pangan rumah tangga di Pulau Bintan serta bagaimana kontribusi perempuan dalam pengelolaan konsumsi dan minimalisasi *food waste* sebagai strategi menjaga ketahanan pangan dalam kerangka *Food and Nutrition Security* (FNS)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis kondisi ketahanan dan kerentanan pangan rumah tangga di Pulau Bintan berdasarkan empat pilar *Food and Nutrition Security* (*availability, access, utilization, dan stability*).
2. Untuk Mengidentifikasi kontribusi dan strategi perempuan dalam pengelolaan konsumsi pangan dan minimalisasi *food waste* sebagai mekanisme menjaga ketahanan pangan keluarga.

3. Untuk Menilai keterkaitan temuan empiris mengenai perempuan di Bintan dengan isu ketahanan pangan global dan keamanan non-tradisional, serta memberikan rekomendasi terkait pencapaian SDGs 2 (*Zero Hunger*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperkaya pengembangan teori *Food and Nutrition Security* (FNS) melalui analisis strategi perempuan dalam pemanfaatan pangan dan pengurangan food waste.
2. Memperkuat kajian mengenai Perempuan sebagai actor keamanan non-tradisional dalam isu ketahanan pangan global.
3. Memberikan kontribusi teoritis bagi penelitian mengenai kerentanan pangan di wilayah kepulauan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Bintan untuk merancang kebijakan pangan yang responsif gender dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
2. Mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target SDGs 2 melalui strategi berbasis rumah tangga untuk mengurangi *food waste*.
3. Menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas lokal dalam merancang program pemberdayaan perempuan terkait pengelolaan pangan dan gizi.